

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik terkait pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas seperti yang dimaksud dalam pasal 41 uu no 12 tahun 2006 (analisa kasus laurencia vanty febrina sidney elizabeth van) = Decision making in public policy related to limited dual citizenship registration as referred to article 41 uu no 12 2006 (case analysis of Laurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth van) / Verawati Harianja

Harianja, Verawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390327&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belum sepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang berkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasus Laurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kasus tersebut antarlain tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasi dengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kewarganegaraan.

Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia, USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USA tanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusan menteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadi warga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta kedua orangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.

Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalami permasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem pengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsir dan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

<hr>

ABSTRAK

The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basic law in accordance with the needs of a growing problem in society or in other words have not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case of Laurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affect such cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain the citizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. The regulation is not properly informed and make people misunderstand about legislation particularly in terms of citizenship.

The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USA dated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA on September 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No. 12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get the Minister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period of four (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to in Article 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parents is still a citizen of Indonesia.

The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making. That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. The absence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from an acquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem in the future.